

Pemenuhan Komitmen Indonesia Untuk Overseas Development Aids (ODA) Dalam Kerangka Kerja Sama Global¹

I. Pendahuluan

Isu ODA telah menjadi perhatian pemimpin-pemimpin G20 sejak KTT G20 di London, dimana komitmen untuk memenuhi target Millenium Development Goals dimasukkan dalam deklarasi pemimpin G20. Penyediaan ODA secara khusus tercatat dalam agenda G20 sejak KTT G20 di Seoul ketika pemimpin-pemimpin G20 bersepakat memasukan agenda Pembangunan dalam proses G20 melalui apa yang dikenal dengan *The Seoul Development Consensus for Shared Growth*. Konsensus Pembangunan Seoul untuk Pertumbuhan bersama menetapkan komitmen para pemimpin G20 untuk “*work in partnership with other developing countries, and LICs in particular, to help them build the capacity to achieve and maximize their growth potential, thereby contributing to global rebalancing.*”²

Secara eksplisit komitmen tentang ODA tertuang dalam the Seoul Summit Document point 53: “*We reaffirm our commitment to achievement of the MDGs We also reaffirm our respective ODA pledges and commitments to assist the poorest countries and mobilize domestic resources made following on from the Monterrey Consensus and other fora.*”³

Namun, *Multi Year Action Plan on Development* yang ditetapkan dalam KTT Seoul tidak menyebut detail tentang operasional dari kemitraan ini. Hal ini sesuai karakteristik kerja sama G20 yang tidak membatasi gerak dan inisiatif negara anggota dalam memenuhi komitmennya, termasuk terkait implementasi kesepakatan-kesepakatan. Namun demikian, setiap pelaksanaan komitmen ini akan dituangkan dalam satu *mutual assessment process* (MAP) yang dapat dimonitor dan dinilai secara peer-review oleh seluruh negara anggota lain.

Kondisi ini kemudian bisa diinterpretasikan bahwa anggota G20 berhak untuk mengadopsi pendekatan masing-masing dalam memenuhi komitmen tersebut.

Komitmen tentang ODA kembali ditegaskan dalam KTT G20 di Cannes, 2011. Dalam Deklarasi Cannes tertuang secara eksplisit pentingnya ODA bagi pencapaian MDGs dan komitmen negara maju maupun ‘emerging economy’:

*“In order to meet the Millennium Development Goals, we stress the pivotal role of ODA. Aid Commitments made by developed countries should be met. Emerging countries will engage or continue to extent their level of support to other developing countries.....”*⁴

Terminologi ODA tidak muncul dalam komunike KTT G20 di Los Cabos. Namun komitmen untuk membantu negara-negara berkembang untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan khususnya MDGs ditegaskan kembali dalam komunike tersebut:

¹Kajian Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral (PKPPIM) BKF. Analisis oleh Yulius Purwadi Hermawan dan Syurkani Ishak Kasim.

²The G20 Seoul Summit Leaders’ Declaration, 11 – 12 Nopember 2010.

³The Seoul Summit Document, poin 53 hal. 14.

⁴Point 28, *the G20 Final Communiqué*, Cannes, Nopember 2011.

“..... we reaffirm our commitment to work with developing countries, particularly low income countries, and to support them in implementing the nationally driven policies and priorities which are needed to fulfill internationally agreed development goals, particularly the Millenium Development Goals (MDGs) and beyond.”

Kajian ini akan mendeskripsikan metodologi pengukuran pemenuhan komitmen yang dipakai oleh tim riset independen dari IORI, National Research University dan Munk School of Global Affairs, University of Toronto. Tim independen ini melakukan penilaian bagi setiap negara anggota G20 dalam memenuhi komitmen partisipasi aktif dan kontribusi finansial dalam mendukung pencapaian tujuan-tujuan pembangunan global, khususnya di negara-negara berkembang lain. Kemudian dalam kajian ini akan dipaparkan assesment terhadap pemenuhan komitmen Indonesia dalam aspek penyediaan ODA dan peningkatan kapasitas negara-negara berkembang. Akan dideskripsikan rincian besar dana bantuan Indonesia dari tahun ke tahun terutama sejak tahun 2000 hingga 2015.

II. Metodologi Pengukuran Pemenuhan Komitmen Penyediaan ODA

Tim Riset IORI, National Research University, Rusia dan Munk School of Global Affairs, Universitas Toronto, Kanada merumuskan pendekatan yang sangat sederhana untuk melihat akuntabilitas anggota-anggota G20 dalam pemenuhan komitmen Pembangunan. Mereka berangkat dari poin yang tertuang dalam deklarasi-deklarasi KTT G20. Deklarasi Cannes membedakan kewajiban antara negara maju dan *emerging countries*. Negara maju seharusnya memenuhi komitmen bantuan yang sudah dibuatnya. Komitmen ini adalah apa yang disebut dengan *respective ODA pledges* dalam dokumen Seoul untuk membantu negara-negara termiskin dan memobilisasi sumber-sumber domestik yang dibuat setelah Konsensus Monterrey dan forum-forum lainnya.

Sementara *emerging countries* berkomitmen untuk terlibat atau melanjutkan untuk memperluas/meningkatkan dukungan mereka pada negara-negara berkembang lainnya.

Dari interpretasi ini peneliti dari dua lembaga tersebut kemudian melihat:

- (1) bagaimana anggota-anggota G20 memenuhi ‘*ODA pledges*’ yang telah dinyatakan secara resmi (baik secara absolut maupun relatif seperti presentase ODA terhadap GNI). Jika anggota tidak memiliki *ODA pledges* yang spesifik yang harus dipenuhi dalam periode pemenuhan tersebut, kepatuhan dilihat berdasarkan volume ODA yang diberikan;
- (2) bagaimana anggota G20 membantu negara-negara termiskin dalam memobilisasi sumber-sumber domestik melalui tindakan-tindakan yang signifikan di bidang-bidang yang telah diidentifikasi dalam konsensus Monterrey sebagai kunci bagi mobilisasi sumber-sumber.

Penetapan skor didasarkan pada pemenuhan dua aspek tersebut:

Nilai minus satu diberikan bila: negara tidak memenuhi *ODA pledges* dan tidak membantu negara-negara miskin dalam memobilisasi sumber-sumber domestik

Nilai Nol bila anggota memenuhi *ODA pledges* atau membantu negara-negara miskin dalam memobilisasi sumber-sumber domestik.

Nilai plus bila anggota memenuhi baik *ODA pledges* dan membantu negara-negara miskin dalam memobilisasi sumber-sumber domestik.

Hasil penilaian yang dibuat menunjukkan bahwa hanya 11 anggota G20 yang memenuhi target yang telah ditetapkan termasuk 8 negara anggota G8 dan Uni Eropa, serta

dua anggota *Development Assistance Committee (DAC)* OECD yaitu Australia dan Korea. Baik anggota G8 dan UE telah menetapkan komitmen individual dalam KTT G8 di Gleneagles tahun 2005 dan telah mengidentifikasi target-target nasional mereka.

Pemenuhan komitmen Indonesia untuk penyediaan ODA telah dinilai minus satu (-1) oleh Tim Riset IORI, National Research University, Rusia dan Munk School of Global Affairs, Universitas Toronto, Kanada. Dalam laporan "*Tracking Progress on the G20 Development Commitments*", mereka mencatat:

*"Indonesia has failed to comply with the commitment on ODA Pledges and assisting the poorest countries to mobilize domestic resources. No information that Indonesia committed to specific ODA targets has been found. Indonesia has engaged in humanitarian aid provision, but no facts that Indonesia has made new substantial ODA commitments during the monitoring period have been found."*⁵

Dalam laporan sebelumnya di bulan Desember 2012, kedua lembaga riset tersebut juga mengambil kesimpulan yang sama: *"The average level of compliance of all the G20 proved rather modest (0,3%), while three countries (Argentina, Indonesia and Mexico) failed to comply."*⁶

Dalam laporan tersebut, tertulis bahwa ditemukan informasi tentang penyediaan bantuan pemerintah Indonesia kepada sejumlah negara dalam upaya penanganan dampak bencana; namun, informasi terkait penyediaan bantuan untuk mobilisasi sumber-sumber domestik di negara-negara berkembang lain tidak ditemukan.

Menarik untuk menelusuri lebih mendalam tentang metode pengukuran dari pemenuhan komitmen. Konsensus Monterrey disebut menjadi acuan dalam penetapan ukuran pemenuhan komitmen, namun tidak ada rincian penjelasan indikator pengukuran yang diambil dari konsensus tersebut.

Point A dari konsensus Monterrey tentang pendanaan bagi pembangunan merinci tindakan-tindakan penting untuk mobilisasi sumber-sumber domestik bagi pembangunan.⁷ Negara-negara maju dan '*emerging economy*' dapat membantu negara-negara berkembang dan negara miskin untuk menjalankan aktivitas tersebut.

"In our common pursuit of growth, poverty eradication and sustainable development, a critical challenge is to ensure the necessary internal conditions for mobilizing domestic savings, both public and private, sustaining adequate levels of productive investment and increasing human capacity. A crucial task is to enhance the efficacy, coherence and consistency of macroeconomic policies. An enabling domestic environment is vital for mobilizing domestic resources, increasing productivity, reducing capital flight, encouraging the private sector, and attracting and making effective use of international investment and

⁵ IORI, National Research University, Rusia dan Munk School of Global Affairs, Universitas Toronto, Kanada. *Tracking progress on the G20 Development Commitments*, January 2013.

⁶ IORI, National Research University, Rusia dan Munk School of Global Affairs, Universitas Toronto, Kanada. *"Mapping G20 Decisions Implementation, How G20 is delivering on the decisions made."* 2012.

⁷ Lihat Monterrey Consensus on Financing for Development, the Final Text of Agreements and Commitments adopted at the International Conference on Financing for Development, Monterrey, Mexico, 18-22 March 2002. Tersedia di <http://www.un.org/esa/ffd/monterrey/MonterreyConsensus.pdf> diakses tanggal 3 Juni 2013.

assistance. Efforts to create such an environment should be supported by the international community.”⁸

Dari poin ini, indikator bagi pemenuhan komitmen ODA dan mobilisasi sumber-sumber domestik memang menjadi sangat terbuka. Definisi bantuan pembangunan bisa diinterpretasikan sebagai segala macam aktivitas yang diarahkan untuk membantu negara-negara berkembang khususnya *low income countries* dalam menerapkan kebijakan-kebijakan dan prioritas-prioritas nasional mereka yang diperlukan untuk memenuhi tujuan-tujuan pembangunan internasional khususnya MDGs.

Ada dua isu penting yang dapat disoroti terkait dengan pengukuran yang dibuat dalam kaitannya dengan pemenuhan komitmen penyediaan ODA.

Isu pertama adalah metodologi pengukuran akuntabilitas. Evaluasi yang dilakukan peneliti dari tim peneliti IORI, National Research University dan Munk School of Global Affairs, University of Toronto tidak mempertimbangkan proses yang sedang berjalan dalam Kelompok Kerja Pembangunan G20 melainkan lebih berinterpretasi atas teks yang tertulis dalam deklarasi, komunike dan dokumen yang merupakan hasil KTT Seoul maupun Cannes. Pembicaraan tentang mekanisme akuntabilitas masih dilakukan hingga saat ini dalam Working Group on Development.⁹

Dalam pertemuan Face to Face Meeting IV di Bali tanggal 3-5 Oktober 2012 isu *tracking commitments of G20* baru mulai dibahas dengan sejumlah kesepakatan. Pertama, mekanisme akuntabilitas didasarkan pada nilai-nilai dasar dan tujuan/komitmen yang telah dituangkan dalam *Seoul Consensus dan Multi-Years Action Plan (MYAP)*; kedua, mekanisme akuntabilitas disusun secara bertahap di mana pada tahap awal akan memfokuskan pada akuntabilitas pencapaian komitmen-komitmen utama dan selanjutnya akan diperluas pada komitmen-komitmen lain; ketiga, proses penilaian akuntabilitas bersifat *member driven* dengan model *Presidency Led Accountability*. Dalam model ini, *Low Income Countries* (LICs) dan negara berkembang yang menjadi penerima manfaat dari kelompok kerja Pembangunan G20 akan dilibatkan untuk melihat akuntabilitas tersebut. Peran Organisasi Internasional dibatasi sebagai pemberi saran/ekspert terhadap proses yang dijalankan. Disepakati pula bahwa peran *assessment* independen bersifat minimal dengan pengertian hanya pada situasi atau kasus yang memerlukan penanganan khusus. Pertemuan tindak lanjut dilakukan untuk mengelaborasi prinsip-prinsip, metodologi dan jadwal waktu penyelesaian dokumen mekanisme akuntabilitas dan komitmen-komitmen utama yang menjadi *baseline commitment* tahap awal.

Isu kedua yang disoroti adalah bahwa penyediaan ODA dan dukungan bagi pengembangan kapasitas di negara-negara berkembang harus dipahami sangat terkait erat dengan kesepakatan pemimpin G20 untuk membantu negara-negara berkembang dalam upayanya mencapai tujuan-tujuan pembangunan mereka sesuai dengan potensi yang mereka miliki. Jika negara-negara tersebut berhasil dalam pembangunan, misi G20 untuk menciptakan *global rebalancing*, --pertumbuhan ekonomi yang seimbang, akan terwujud. Dalam pemahaman ini negara berkembang menjadi subjek penting dari agenda pembangunan G20. Ini merupakan suatu mekanisme *outreach* penting untuk memastikan bahwa G20 yang keanggotaannya eksklusif dapat membuktikan kontribusinya bagi non-anggota, dalam hal ini khususnya negara-negara berkembang. Indonesia merupakan negara yang sangat mendukung masuknya agenda pembangunan dalam proses G20.

⁸ Ibid.

⁹ Interview dengan Perwakilan Bappenas tanggal 5 Juni 2013.

Dengan pemahaman ini, penilaian terhadap pemenuhan komitmen pembangunan harus melihat juga seberapa jauh negara-negara berkembang dengan pendapatan menengah (*middle income countries*) seperti Indonesia telah mengimplementasikan sejumlah inisiatif untuk mendukung negara-negara berkembang baik sesudah maupun sebelum agenda Pembangunan disepakati di Seoul. Penilaian ini tidak sekedar melihat pada ukuran-ukuran konvensional seperti yang diterapkan pada *DAC's existing donors* dengan melihat pada seberapa jauh negara memenuhi prosentasi bantuan dari *Gross National Income* masing-masing. Pemahaman historikal menjadi sangat penting untuk melihat kontribusi ini. Artinya penilaian atas pemenuhan tidak sekedar melihat pada konteks pasca disepakatinya agenda pembangunan dalam KTT Seoul pada bulan Nopember 2010. Konteks KTT Seoul harus dilihat sebagai '*reminder*' bagi negara-negara maju untuk memenuhi janji mereka yang telah dibuat sejak tahun 1970an, dan bagi negara-negara *berkembang berpendapatan menengah* baru untuk menambah volume bantuan yang selama ini telah diberikan.

III. Upaya Indonesia Membantu Pembangunan di LICs dan negara berkembang lain

Dengan melihat pada pendekatan *member-driven*, pemenuhan komitmen penyediaan ODA dapat melihat sejumlah inisiatif yang selama ini telah dibuat dan dilakukan anggota G20 dalam membantu negara-negara LICs dan berkembang lainnya untuk mengejar target pembangunan mereka, khususnya MDGs yang telah dicanangkan di tahun 2000. Sejumlah inisiatif dan aktivitas dapat dipaparkan di Sub Bab ini.

1. Partisipasi aktif Indonesia dalam forum bantuan pembangunan internasional

Dalam konteks agenda pembangunan, Indonesia merupakan negara yang telah aktif dalam menjalin kerjasama dengan negara-negara berkembang sejak tahun 1950an dengan penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika yang menjadi titik awal historik penting bagi kerjasama Selatan Selatan. Sejumlah forum internasional telah diselenggarakan di kalangan negara-negara berkembang bersama-sama dengan negara-negara partner yang berkomitmen bagi keberhasilan pembangunan di negara-negara berkembang. *Buenos Aires Plan of Action* (BAPA) disebut sebagai tonggak penting bagi pentingnya kerjasama teknis negara-negara Selatan Selatan. Dokumen ini dihasilkan dalam *United Nations Conference on Technical Cooperation Among Developing Countries* tanggal 12 September 1978 yang dihadiri oleh 138 negara peserta. Kerjasama di antara negara-negara berkembang disebut sebagai fondasi bagi suatu tata ekonomi internasional baru.¹⁰

Indonesia juga berpartisipasi dalam pembentukan sejumlah deklarasi di serangkaian *High Level Forum* untuk memastikan komitmen pembangunan dan pencapaiannya di negara-negara berkembang,¹¹ seperti Rome Declaration (2003),¹² Paris Declaration (2005), Accra Agenda for Action (2008)¹³, dan the Busan Partnership for Effective Development (2011).¹⁴

2. Peran Aktif Indonesia dalam Kerjasama Selatan Selatan dan Triangular

¹⁰ Lihat dokumen Buenos Aires Plan of Action, http://southsouthconference.org/?page_id=276

¹¹ The High Level Fora on Aid Effectiveness: A History, <http://www.oecd.org/dac/effectiveness/thehighlevelforaonaideffectivenessahistory.htm>

¹² Rome Declaration on Harmonisation.

¹³ The Paris Declaration on Aid Effectiveness and the Accra Agenda for Action, <http://www.oecd.org/development/effectiveness/34428351.pdf>; tentang deklarasi Paris dapat dilihat di <http://www.oecd.org/dac/effectiveness/parisdeclarationandaccraagendaforaction.htm#Accra>.

¹⁴ Lihat dokumen Busan Partnership for Effective Development Cooperation, Fourth High Level Forum on Aid Effectiveness, Busan republic of Korea, 29 November – 1 December 2011.

Indonesia telah berkontribusi secara khusus dalam Kerja Sama Selatan Selatan dan Triangular (KSST) sejak tahun 1981.¹⁵ KSST adalah suatu model kerjasama yang dikembangkan untuk membantu negara-negara berkembang dalam mencapai target pembangunan mereka.

Untuk meningkatkan komitmennya, Indonesia telah mencantumkan KSST sebagai salah satu prioritas dalam RPJMN 2010-2014, membentuk Tim Koordinasi KSST Indonesia dan menyusun Rencana Induk dan Cetak Biru KSST. Tim Koordinasi tersebut dirasakan mendesak karena selama ini pelaksanaan KSST dilakukan oleh Kementerian atau Lembaga terpisah dan kebijakan implementasi tersebut belum terintegrasi secara memadai.¹⁶

Pada tahun 2012, keseriusan Indonesia untuk meningkatkan kontribusinya ditunjukkan dengan serangkaian pertemuan yang diselenggarakan oleh kementerian dan lembaga terkait serta dengan negara-negara mitra pembangunan.¹⁷ Kementerian Luar Negeri sebagai *focal point* dalam koordinasi KSST mengidentifikasi prioritas negara-negara calon penerima bantuan teknik yang nantinya dapat dilakukan oleh seluruh Kementerian atau Lembaga terkait. Kementerian ini juga menyusun *standard operational procedure* (SOP) untuk mekanisme evaluasi program pengembangan kapasitas yang nantinya akan dipakai Indonesia untuk melihat efektivitas bantuan luar negerinya. Pada tanggal 16-19 Oktober 2012 tim Koordinasi KSS dan Triangular Indonesia menyelenggarakan *Training for Evaluator Phase I* di Yogyakarta. Pada tanggal 30 Nopember – 1 Desember 2012 diselenggarakan pemutakhiran daftar prioritas nasional program bantuan teknik kerjasama Selatan Selatan.

Selain persiapan internal, pemerintah juga menyelenggarakan forum internasional, *High Level Meeting* (HLM) di Bali pada tanggal 10-12 Juli 2012 dengan tema *Toward Country Led Knowledge Hubs*. Pertemuan tersebut dihadiri 200 peserta dari 40 negara dan mitra pembangunan. Dalam pertemuan tersebut Indonesia menyampaikan bidang-bidang yang akan ditekankan dalam promosi KSST, yaitu bidang pembangunan, *good governance* dan bidang ekonomi. Indonesia meyakini bahwa Indonesia memiliki kapasitas dan keunggulan komparatif di ketiga bidang tersebut. Dalam forum internasional tersebut Indonesia juga mengumumkan *pledge* Indonesia untuk berkontribusi sebesar 1,5 juta USD kepada *South-South Facility* dan *World Bank Institute*.¹⁸

Penelusuran melalui internet menunjukkan tidak ada data presis tentang jumlah pendanaan yang telah dikeluarkan pemerintah Indonesia. Sesuai dengan laporan Sekretariat Kabinet Republik Indonesia dalam kurun waktu 2000-2012, Indonesia telah berkontribusi sekitar 50 juta dolar AS.¹⁹ Catatan analisis dari David Hatch menyebut bahwa dalam kurun waktu 2002-2012, Indonesia telah menyediakan dana bantuan sebesar 45 juta USD untuk negara-negara berkembang lainnya.²⁰

¹⁵ Menyongsong dominasi positif Indonesia di Selatan dalam bidang pertanian. <http://www.deptan.go.id/news/detail.php?id=1065>

¹⁶ Tentang Pengembangan Kerjasama Selatan Selatan dan Triangular, <http://www.setkab.go.id/berita-5174-tentang-pengembangan-kerjasama-Selatan-Selatan-dan-triangular.html>, diupload tanggal 27 Juli 2012.

¹⁷ Kerjasama Selatan Selatan dan Triangular. <http://setjen.deptan.go.id/kln/detail1.php?id=321>

¹⁸ Tentang Pengembangan Kerjasama Selatan Selatan dan Triangular, Loc.Cit.

¹⁹ Ibid.

²⁰ David Hatch, *Indonesia, emerging aid donor*, dapat diunduh di: <http://www.lowyinterpreter.org/post/2012/07/25/Indonesia-emerging-aid-donor.aspx> (akses tanggal 9 April 2013)

Tabel 13.1. Rekapitulasi Pendanaan Kegiatan KSS Indonesia Periode Tahun 2000-2010

No.	Instansi	Nominal	
		Dalam Rupiah	Dalam US\$*
1.	Kementerian Pertanian	124.414.429.354	12,441,442.94
2.	BKKBN	62.659.590.000	6,265,959.00
3.	Kemendiknas	60.083.000.000	6,008,300.00
4.	Kementerian Luar Negeri	24.821.006.433	2,482,100.64
5.	IPB	19.025.000.000	1,902,500.00
6.	Sekretariat Negara	16.500.000.000	1,650,000.00
7.	Pekerjaan Umum	12.750.000.000	1,275,000.00
8.	Kominfo	10.190.850.000	1,019,085.00
9.	MMTC	7.000.000.000	700,000.00
10.	POLTEK	5.400.000.000	540,000.00
11.	Kemsos	1.600.000.000	160,000.00
12.	Perindustrian	959.297.000	95,929.70
13.	Bakosurtanal	500.000.000	50,000.00
14.	Kementerian Kehutanan	150.000.000	15,000.00
15.	Kementerian Perhubungan	24.000.000	2,400.00
16.	Lembaga lain**	73.326.250.000	7,332,625.00
	TOTAL	419.403.422.787	41,940,342.28

* Perhitungan US\$ didasarkan atas asumsi USD/Rp = 10.000 dan perhitungan inflasi 10% pertahun.

** Lembaga lain meliputi: Balai Besar Inseminasi Buatan, Sabo Training Center, Yayasan Dian Desa, NAM CSSTC, National Agribusiness in Service TC on Dairy Husbandry and Post Harvest Technology, PT Perkebunan Nusantara VIII, Pusat Penelitian Jalan dan Jembatan, Pusat Studi Ekonomi dan Sosial, Pusat Penelitian Pembangunan dan Perumahan.

Sumber: Diolah dari Bappenas, Rekapitulasi 2000-2010, perankingan kementerian/Lembaga oleh peneliti.

Bappenas mencatat bahwa dalam kurun waktu 2000-2010, Indonesia mengeluarkan sekitar 41,9 juta USD untuk mendanai sekitar 700 kegiatan kerjasama Selatan Selatan. Kegiatan tersebut dilakukan oleh lebih dari 15 kementerian dan lembaga.

Tabel 13.1 menunjukkan rekapitulasi pendanaan pelaksanaan kegiatan KSS Indonesia periode 2000-2010.

Tabel 13.2. Rekapitulasi Anggaran Kegiatan Kerjasama Selatan Selatan dan TriangularSeluruh Kementerian dan Lembaga terkait 2013-2015 (dalam ribuan)

		Alokasi 2013	Alokasi 2014	Alokasi 2015	Total Alokasi 2013-2015
APBN	Rupiah	56.588.892,49	73.972.199,10	58.637.203,04	189.198.394,63
	US\$	-			
Hibah	Rupiah	2.275.633,17	908.167,00	770.168,00	3.953.968,17
	US\$	30.171	-	-	30,171
Total	Rupiah	59.145.115,96	74.879.366,10	59.407.371,04	193.151.262,80 (Rupiah)
					30,171 (USD)

Sumber: Diolah dari Bappenas, *Rekapitulasi Data Masuk Kegiatan Kerjasama Selatan Selatan dan Triangular Kementerian dan Lembaga*, 2013-2015, per tanggal 1 April 2013.

**Tabel 13.3. Rekapitulasi Anggaran Kegiatan Kerjasama Selatan Selatan dan Triangular di Masing-masing Kementerian 2013-2015
(dalam Rupiah kecuali diindikasikan dalam US\$)**

Per tanggal 1 April 2013

(Dalam ribuan)

No.	Kementerian/Lembaga	Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015	
		APBN	Hibah	APBN	Hibah	APBN	Hibah
1.	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	34.684.441,00	-	38.252.020,00	-	43.501.846,00	-
2.	Kementerian Luar Negeri	9.069.051,00	-	18.999.856,34	138.000,00	n.a.	-
3.	Kementerian Perhubungan	4.561.270,00	-	13.270.742,76	-	14.597.817	-
4.	Kementerian Pekerjaan Umum	2.434.695,00	-	n.a.	-	n.a.	-
5.	Kementerian Sekretariat Negara	1.930.471,00	-	2.546.141,00	-	n.a.	-
6.	Kementerian Pertanian	1.020.481,00	432.450,00	n.a.	-	n.a.	-
7.	Kementerian Kesehatan	978.265,00	494.040,00	244.495,00	494.040,00	244.495,00	494.040,00
8.	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana	515.074,99	349.113,00	293.044,00	276.127,00	293.045,00	276.128,00
9.	Kementerian Kelautan dan Perikanan	500.000,00	-	n.a.	-	n.a.	-
10.	Badan Pemeriksa Keuangan	435.989,50	-	n.a.	-	n.a.	-
11.	Kementerian Dalam Negeri	300.000,00	1.000.000,00	n.a.	-	n.a.	-
12.	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	159.154,00	-	364.900,00	-	-	-
13.	Kementerian PPN/Bappenas	-	US\$ 30.171*	n.a.	-	n.a.	-
	TOTAL	56.588.892,49	2.556.223,47	74.879.366,00	-	59.407.371,00	-

- US\$ 1 = Rp. 9.300,00.

Sumber: Perankingan disusun oleh peneliti berdasar data Bappenas, *Rekapitulasi Data Masuk Kegiatan Kerjasama Selatan Selatan dan Triangular Kementerian dan Lembaga*, 2013-2015, per tanggal 1 April 2013.

Dalam kurun 2013-2015, kontribusi Indonesia dalam skema KSST direncanakan meningkat. Seperti dapat dilihat pada Tabel 13.2, pada tahun 2013, pemerintah Indonesia mengalokasikan dana sebesar 59 milyar Rupiah lebih untuk mendukung kegiatan kerjasama Selatan Selatan. Limapuluh setengah milyar lebih diambil dari APBN, sementara 2,5 milyar diambil dari dana hibah. Jumlah ini direncanakan meningkat menjadi 74 milyar lebih pada tahun 2014. Jumlah ini terdiri dari 73,9 milyar dari APBN dan 908 juta dari hibah. Pada tahun 2015 direncanakan sebesar 59 milyar lebih untuk mendukung KSST ini,²¹ 58,6 milyar diambil dari APBN, dan 770 juta diambil dari Hibah. Sehingga dalam tiga tahun mendatang direncanakan anggaran total mencapai 193 milyar lebih untuk program KSST ini.

²¹ Bappenas, *Rekapitulasi Data masuk kegiatan Kerjasama Selatan Selatan dan Triangular kementerian dan lembaga 2013-2015*, April 2013.

Seperti ditunjukkan dalam Tabel 13.3, Kementerian Pendidikan merupakan kementerian yang memberikan alokasi paling besar di antara 13 kementerian dan lembaga yang terlibat. Pada tahun 2013 Kementerian ini mengalokasikan sebesar 34,6 milyar lebih untuk kegiatan KSST ini; jumlah ini direncanakan meningkat pada tahun 2014 menjadi sebesar 38,2 milyar Rupiah dan pada tahun 2015 sebesar 43,5 milyar Rupiah. Kementerian Luar Negeri menjadi kementerian kedua dengan jumlah anggaran sebesar 9 milyar Rupiah untuk tahun 2013 dan meningkat menjadi 18 milyar pada tahun 2014. Kementerian Pekerjaan Umum mengalokasikan anggaran sebesar 2,4 milyar Rupiah untuk tahun 2013.

Empat kementerian mengkombinasikan dana dari APBN dan hibah yaitu Kementerian Pertanian, Kementerian Kesehatan, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana dan Kementerian Dalam Negeri untuk alokasi tahun 2013. Sementara untuk tahun 2014, tiga Kementerian mendapatkan juga hibah, di samping alokasi dana dari APBN. Kementerian tersebut adalah Kementerian Kesehatan, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana, dan Kementerian Luar Negeri.

3. Kontribusi Indonesia dalam South-South Exchange Facility Bank Dunia

Di samping bantuan teknis yang disalurkan oleh Indonesia melalui KSST, pemerintah Indonesia juga berkontribusi pada pengembangan *the South-South Experience Exchange Facility* Bank Dunia. Fasilitas Selatan Selatan adalah suatu *multi-donor trust fund* yang dibentuk sejak Oktober 2008 untuk memfasilitasi sharing pengalaman di antara negara-negara klien Bank Dunia. Pertukaran pengalaman diselenggarakan atas dasar permintaan negara penerima bantuan (*recipient*) dan dirancang khusus dengan target tertentu yang hasilnya kemudian dimasukkan dalam suatu *online knowledge library*. Fasilitas Selatan Selatan ini terdiri dari partner-partner unik termasuk dari *middle income countries* seperti China, Denmark, Meksiko, Belanda, Spanyol, Inggris, India, Rusia dan Kolombia. Indonesia direncanakan bergabung dalam *multi-donor trust fund* ini pada tahun 2013.

Dalam laporan World Bank Institute, Indonesia tercatat telah aktif dalam South-South Facility Exchanges, sejumlah lima kali sebagai *provider* dan dua kali sebagai *receiver*. Sebagai contoh, Indonesia tercatat aktif bersama-sama dengan Brazil dan Meksiko dalam program pengentasan kemiskinan ekstrim (*Tackling Extreme Poverty*) di Bolivia dengan total pendanaan sebesar 77.200 USD dalam kurun waktu 3 April 2009 hingga 31 Oktober 2010.²² Program ini telah memberikan bekal pengetahuan dan skill kepada para perencana pembangunan di Bolivia untuk merancang dan mengimplementasikan program-program sosial yang vital dan paling diperlukan masyarakat yang paling membutuhkan.

Indonesia bersama-sama dengan China terlibat dalam program *Empowering local governments and reducing regional disparity: learning from China and Indonesia* atas permintaan India pada periode 2 Agustus 2011 hingga 30 Juni 2012 dengan hibah sebesar 18.559 USD. Indonesia juga terlibat aktif bersama-sama dengan Afrika Selatan, Rwanda dan Macedonia dalam kegiatan resolusi konflik di Nepal (*Nepal: Understanding Experiences in post Conflict State building from South Africa, Rwanda and Indonesia*) dengan hibah sebesar 116.015 USD pada periode 22 Mei 2009 hingga 31 Maret 2010.²³

Indonesia menjadi *providing country* dalam kegiatan *Haiti Community Driven Development Housing Reconstruction Knowledge Exchange* di Haiti dengan dana hibah sebesar USD 39.691 di tahun 2011.²⁴ Melalui kegiatan ini, delegasi dari Kementerian Perencanaan Haiti mengunjungi tiga propinsi di Indonesia untuk melihat sendiri proyek-proyek

²² The South-South Experience Exchange Facility, 2011 Implementation Progress Report. Hal. 8

²³ Lihat Annex 1. South-South Facility Completed Grants as of December 31, 2012.

²⁴ The South-South Experience Exchange Facility 2011 Implementation Progress Report Hal. 7

rekonstruksi pasca bencana. Dalam kegiatan ini delegasi mempelajari konsep gotong royong swadaya (*community self-help*) yang telah menjadi prinsip dalam pembangunan berbasis masyarakat; pentingnya kepemimpinan nasional dan lokal yang kuat untuk menyusun rencana bagi proses pembangunan kembali pasca bencana; pentingnya *sense of ownership*; kemampuan koordinasi dan monitoring bantuan global, pencegahan korupsi dalam proyek-proyek rekonstruksi. Delegasi juga belajar bagaimana mereka dapat meng-upgrade infrastruktur dan pelayanan masyarakat di Haiti.

Indonesia menjadi *providing country* bagi *South-South Facility Grants* untuk beberapa kegiatan yang diselenggarakan di beberapa negara berkembang.²⁵ Indonesia menyediakan hibah untuk kegiatan “*Knowledge and Experience Exchange between Indonesia and Vietnam on Output and Results based Approach for Local Government Programs*” atas permintaan Vietnam, yang disetujui pada 21 Agustus 2012 dan berakhir pada 28 Februari 2013 dengan jumlah hibah sebesar 30.000USD.

Sebagai bukti komitmen Indonesia sebagai *middle-income country*, Indonesia berkomitmen untuk menjadi partner dalam *multidonor trust fund* ini. Pada tahun 2012, Indonesia menyepakati untuk memberi kontribusi sebesar 1,5 juta USD ke Bank Dunia melalui *South-South Exchange Facility*.²⁶ Janji ini telah disampaikan dalam High Level Meeting di Bali pada bulan Juli 2012 dan telah tercatat dalam laporan tahunan Bank Dunia: “*Indonesia has also expressed interest in becoming a Partner in 2013 with a contribution of \$1.5 million in 2014.*”

4. Penyelenggaraan Capacity Building Program oleh Indonesia

Kementerian Luar Negeri mencatat bahwa sejak tahun 2006 hingga Oktober 2011, Kementerian ini telah bekerjasama dengan kementerian lembaga teknis terkait dalam menyelenggarakan 42 program pelatihan yang dihadiri 542 orang dari berbagai negara di Asia, Pasifik, Timur tengah, Afrika dan Amerika Latin. Pelatihan tersebut di antaranya adalah (1) Pengembangan Inkubator bisnis untuk pemberdayaan UKM; (2) pengembangan teknologi mikro hidro; pendirian dana pengelolaan institusi microfinance; (4) pengembangan ecotourism, (5) budidaya udang dan kerapu; (6) pengembangan teknologi pasca panen; (7) mekanisasi dan pengelolaan air untuk pertanian lahan kering. Pada periode 2007 dan 2011, Kementerian Luar Negeri menyelenggarakan program pemagangan petani asing di Indonesia. Program ini diikuti para petani dari Fiji, Gambia, Senegal, Madagaskar, Kamboja, Myanmar, Mozambik dan Komoros.²⁷ Sepanjang tahun 2011, Kementerian Luar Negeri telah mengadakan 12 kegiatan pelatihan dan pemagangan di mana 108 peserta dari Asia, Afrika, Timur Tengah dan Pasifik berpartisipasi; di antaranya adalah *International Training Program on Post Harvest Technology on Fruit and Vegetables* tanggal 7-21 April 2011 dengan peserta dari Bangladesh, Fiji, Laos, Sri lanka dan Timor Leste dan *Indonesia Apprenticeship Program for Comorian Farmers in Indonesia* 3- April- 27 Mei 2011.

Pada tahun 2012 Direktorat KSST telah mengembangkan kerjasama teknik melalui 56 program di 49 negara. Sebanyak 1.014 peserta terlibat dalam program yang mencakup

²⁵ Lihat Annex 2. South-South Facility Grants under Implementation as of December 31, 2012.

²⁶ World Bank Institute, *The South-South Experience Exchange Facility, 2012 Implementation Progress Report, Systematic Global Knowledge Exchange for Result*, hal. 8, http://wbi.worldbank.org/sske/Data/wbi/wbicms/files/drupal-acquia/wbi/SSFAR_Final_HighRes.pdf diakses 5 Juni 2013.

²⁷ Diplomasi 2011, hal. 252- 253, http://www.embassyofindonesia.org/features/pdf/Diplomasi_2011.pdf

berbagai bidang seperti pertanian, kehutanan, perikanan, *microfinance*, UKM, energi terbarukan dan *good governance*.²⁸

Bappenas mencatat serangkaian program pelatihan yang diperuntukan bagi partisipan dari negara-negara termiskin untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam menciptakan, mengembangkan dan memobilisasi sumber-sumber domestik mereka. Contoh-contoh program tersebut adalah *Third Training Program on Farm Machinery and Equipment*, *Third Country Training Program on Appropriate Mechanization and Water Management for Dryland Agriculture*, dan *Training Course of Artificial Insemination on Dairy Cattle for Developing Countries*.²⁹

Indonesia juga telah menyelenggarakan serangkaian training dalam bidang manajemen makroekonomi dan pembangunan di African Institute for Capacity Development (AICAD) di Kenya (tahun 2005 dan 2007). Indonesia telah menyelenggarakan training dalam bidang ekspor di Vietnam (2010) dan Laos (2011). Indonesia juga telah mengadakan Trade Training Workshop on Starting Export Business di Laos (2010) dan tentang Planning and Executing Export Business di Timor Leste (2011). Dalam sektor industrial, Indonesia berbagi pengalaman kepada masyarakat Mozambique tentang management produk agrokultural dan tekstil dengan mengirim pakar-pakar Indonesia ke negara Afrika tersebut di tahun 2011. Program ini terdiri dari pemrosesan dan pengolahan ketela pohon.³⁰

Dalam sektor agrikultur, Indonesia telah mengirimkan ekspertnya untuk membantu revitalisasi *the Farmers Agricultural Rural Training Center* (FARTC) di Tanzania dan *Agricultural Rural Farmers Training Center* (ARFTC) di Gambia di tahun 2011.³¹ Ekspert Indonesia berupaya untuk meningkatkan kapasitas petani lokal dalam mengadopsi beragam metode agrikultur dan diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan produksi pertanian di kawasan tersebut. Indonesia juga telah menyelenggarakan serangkaian kursus pelatihan dalam inseminasi artifisial: *the Training Course of Artificial Insemination on Dairy Cattle for Developing Countries* sejak tahun 1986. Sekitar 5.602 peserta telah mengikuti pelatihan dari lokal maupun internasional. Di antara peserta internasional berasal dari Kamboja, Laos, Vietnam, Thailand, Malaysia, Philippina, Timor Leste, Papua Nugini, Fiji, Bangladesh, India, Srilanka, Mongolia, Sudan dan Zimbabwe.³²

Pada tahun 2012, Badan Kebijakan Fiskal menyelenggarakan program pelatihan untuk pengembangan dan pendalaman pasar kapital di negara-negara anggota ASEAN, khususnya CLMV dan Brunei.³³ Pelatihan ini juga bertujuan untuk memperkuat dan memajukan kontribusi Indonesia dalam pengembangan pasar kapital di kawasan Asia Tenggara, dan untuk mendukung negara-negara partner untuk mengatasi krisis ekonomi dengan menyusun strategi dan lembaga-lembaga baru.

IV. Kesimpulan dan Rekomendasi

Dengan melalui penelusuran beragam situs, telah ditemukan beragam program dan aktivitas yang telah dilakukan Indonesia untuk mendukung pembangunan di negara-negara berkembang lainnya. Indonesia telah memberikan bantuan teknis terkait dengan *capacity building* di lebih dari empatpuluh negara berkembang lain. Sumber-sumber yang tersedia

²⁸ Seperti disampaikan Direktur KSST Indonesia, dalam “Menyongsong Dominasi Positif Indonesia di Selatan dalam bidang Pertanian”, data diupdate tanggal 20 Desember 2012. <http://www.deptan.go.id/news/detail.php?id=1065>

²⁹ Interview dengan perwakilan dari Bappenas pada tanggal 5 Juni 2013.

³⁰ Lihat http://ssc-indonesia.org/train_program.php?menu_id=65&gid=8&id=6

³¹ http://ssc-indonesia.org/train_program2.php?menu_id=13&id=3

³² http://ssc-indonesia.org/train_program2.php?menu_id=13&id=2

³³ http://ssc-indonesia.org/train_program.php?menu_id=65&gid=8&id=7

terserak di beberapa kementerian terkait yang selama ini aktif dalam KSST. Ini menggambarkan bahwa pelaksanaan KSST memang belum terkoordinasi dan terintegrasi secara baik seperti diakui oleh pejabat-pejabat terkait di lingkungan kementerian yang menjalankan program tersebut.

Indonesia juga telah menyampaikan komitmennya menjadi partner dalam program *exchange facility* Bank Dunia. Aktivitas Indonesia tercatat cukup baik dalam situs World Bank Institute dan Annual Report yang dibuat tahun 2011 dan tahun 2012.

Kajian ini menunjukkan bahwa penilaian negatif yang dilakukan oleh Tim Riset IORI, Higher School of Economics, National Research University dan Munk School of Global Affairs, University of Toronto tidak tepat. Indonesia dengan kemampuan yang dimiliki telah melakukan sejumlah program penting untuk mendukung pembangunan di negara-negara berkembang lain. Ini dilakukan sebelum komitmen pembangunan disepakati dalam KTT G20 di Seoul, dan terdapat bukti peningkatan kontribusi tersebut di tahun-tahun pasca KTT Seoul. Peningkatan ini juga telah direncanakan untuk dilakukan di tahun 2013, 2014 dan 2015.

Dari kajian ini dapat direkomendasikan pentingnya koordinasi yang lebih efektif di antara kementerian dan lembaga yang selama ini mengambil bagian dalam KSST baik dalam hal program dan aktivitas, maupun pendanaan. Pelaporan tentang aktivitas dan pendanaan menjadi penting untuk menunjukkan tingkat keseriusan Indonesia dalam memenuhi komitmennya dalam G20. Untuk memperkuat eksposur ke komunitas internasional, publikasi laporan perlu ditulis dalam bahasa Inggris sehingga dapat diakses oleh komunitas internasional. Koordinator KSST dapat lebih aktif lagi dalam melengkapi situs KSST Indonesia dengan laporan pelaksanaan program KSST oleh Indonesia secara lebih lengkap. Ini akan menjadi perpustakaan virtual yang mensharingkan *knowledge* bagaimana Indonesia sebagai *middle-income country* baru dalam mengemban tanggungjawabnya sebagai *new emerging aid donor*.